

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

**Pertama**, mutu pendidikan SMK diidentifikasi dengan nilai akreditasinya. Di 8 (delapan) SMK Kabupaten Sijunjung nilai akreditasi sekolah rata-rata berkategori *cukup rendah* dilihat dari 25% sekolah tersebut masih memiliki nilai akreditasi jauh dari yang diharapkan yakni C. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa belum semua SMK di Kabupaten Sijunjung mampu mensinergikan dengan baik keempat faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya; rasio guru-murid, sarana prasarana, guru bersertifikasi dan pengalaman mengajar guru. Untuk itu keempat faktor tersebut perlu ditingkatkan mengingat mutu pendidikan SMK di Kabupaten Sijunjung yang masih rendah.

**Kedua**, berdasarkan hasil penelitian dan analisa data ditemukan:

- a. Nilai F hitung sebesar 10,54547. F tabel untuk koefisien alpha 0,05 = 2,42. Maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $10,54547 > 2,42$ ), dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Ini berarti faktor sarana prasarana, rasio guru-murid, guru bersertifikasi dan pengalaman mengajar guru secara bersama-sama mempengaruhi nilai rata-rata Ujian Nasional SMK (indikator mutu) di Kabupaten Sijunjung.
- b. Nilai  $R^2$  yang didapat sebesar 0,8056. Berarti nilai rata-rata Ujian Nasional SMK (indikator mutu) di Kabupaten Sijunjung dipengaruhi

80,56% oleh sarana prasarana, rasio guru-murid, guru bersertifikasi dan pengalaman mengajar guru dan 19,44% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

- c. Nilai t hitung (t-statistik) untuk masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa faktor sarana prasarana dan pengalaman mengajar guru berpengaruh dan signifikan terhadap nilai rata-rata Ujian Nasional SMK (indikator mutu) di Kabupaten Sijunjung. Sementara rasio guru-murid dan guru bersertifikasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai rata-rata Ujian Nasional SMK (indikator mutu) di Kabupaten Sijunjung.

**Ketiga**, berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan di atas maka pihak sekolah perlu mengusulkan kebijakan kepada Pemerintah Pusat, Dinas Pendidikan, dan Sekolah, terkait upaya meningkatkan mutu pendidikan di SMK Kabupaten Sijunjung, yaitu:

- 1) Memprioritaskan ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana yang relevan sesuai dengan tuntutan kurikulum, kepada sekolah-sekolah yang terakreditasi C.
- 2) Mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan kompetensi guru sehingga guru yang telah lama berpengalaman dalam mengajar disertai dengan *track record*-nya dalam pengembangan diri akan dapat menjadi guru yang profesional dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

- 3) Mengevaluasi dan melakukan perbaikan program sertifikasi guru agar lebih memberikan kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan.
- 4) Mengurangi jumlah murid pada sekolah-sekolah yang memiliki murid *over-quantity* dan menambah personil guru pada sekolah-sekolah yang minim guru, agar rasio guru-murid yang seimbang dapat tercapai.

## 6.2 Saran

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka perlu disarankan:

- 1) Alokasi dana atau anggaran untuk SMK harus berdasarkan kebutuhan sekolah tersebut, untuk itu Dinas Pendidikan harus lebih memprioritaskan kepada penyediaan dan kelengkapan Sarana Prasarana. Dengan memberikan alokasi anggaran sarana prasarana sesuai kebutuhan maka diharapkan mutu pendidikan SMK di Kabupaten Sijunjung akan meningkat.
- 2) Guru harus selalu meningkatkan kualitasnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dengan aktif mengikuti penataran, pendidikan dan pelatihan (diklat), terutama guru SMK dituntut harus selalu siap terhadap perubahan dan perkembangan teknologi yang cepat dan sesuai dengan tuntutan dunia usaha/dunia industri.
- 3) Pemerintah pusat agar memberikan tunjangan sertifikasi guru berdasarkan kinerja guru dan telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) karena proses sertifikasi guru selama ini hanya berdasarkan jumlah jam mengajar dengan mengabaikan profesionalisme kerja.

- 4) Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar melakukan penataan dan pemerataan distribusi guru terutama di daerah. Dengan adanya jumlah murid yang jauh melampaui jumlah ketersediaan guru sehingga terdapatnya rasio guru-murid yang timpang. Dengan mengalokasikan guru pada suatu sekolah yang kekurangan jumlah guru, maka rasio guru murid yang ideal dapat dicapai demi meningkatnya mutu pendidikan SMK di Kabupaten Sijunjung.

